

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses ganti kerugian untuk pengadaan tanah untuk pembangunan jalan KKN menuju Eks kebun kelapa hibrida adalah dengan penilaian dari tenaga ahli yang sudah ditetapkan, untuk tanah dan bangunan dinilai oleh tenaga ahli yang professional sedangkan untuk ganti rugi tanaman ditetapkan oleh Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/685/ Bup-Pasbar tahun 2014 tentang Penetapan Standarisasi Harga Ganti Kerugian Tanaman yang terkena pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Pembayaran ganti rugi diserahkan secara langsung kepada pemegang hak atas tanah sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dalam musyawarah dengan dihadiri oleh ahli waris dan saksi kemudian difoto sebagai bukti dan dokumentasi serta kwitansi atas pembayaran tanah tersebut, kemudian terakhir tanah tersebut diserahkan secara resmi kepada pemerintah oleh pemegang hak atas. Bentuk dari ganti kerugian tersebut adalah berupa uang tunai terhadap nilai tanah, bangunan dan tanaman, tidak ada bentuk lain yang diberikan, namun pelaksanaan pemberian ganti kerugian untuk bangunan tidak diberikan karena menemui beberapa kendala dan ini merupakan ketentuan yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kendala yang dihadapi yaitu tidak adanya aturan yang mengatur secara jelas dan pasti mengenai penggantian nilai untuk tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berada diatasnya yang terkena dampak pengadaan tanah, oleh karena itu sulit untuk mencapai kesepakatan antar pihak, yaitu pihak pemerintah dan masyarakat, meski demikian pembangunan jalan KKN menuju Eks Kebun Kelapa Hibrida di Kabupaten Pasaman Barat tetap dilaksanakan karena menimbang perencanaan pembangunan struktur dan tata kota yang sudah ditetapkan. Pengadaan tanah dalam pembangunan jalan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan dan masalah seperti ganti rugi untuk bangunan dan komunikasi antar pihak pemerintah dan masyarakat yang kurang baik.

#### **B. Saran**

1. Hendaknya pihak pemerintah melalui instansi atau panitia pengadaan tanah dalam pelepasan hak atas tanah lebih arif dan bijaksana dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat.
2. Bentuk dan besarnya ganti kerugian hendaknya lebih transparansi dan disesuaikan dengan keadaan, situasi, dan kondisi harga pada saat itu agar para pihak yang terlibat tidak merasa dirugikan dan lebih terbuka hatinya untuk melepaskan hak atas kepemilikan tanahnya
3. Untuk pihak masyarakat hendaknya lebih mengerti akan pentingnya pelaksanaan pembangunan jalan KKN menuju Eks kebun kelapa hibrida ini sehingga

dengan penuh kesadaran akan rela melepaskan hak atas kepemilikan tanahnya.

4. Untuk mewujudkan keadilan antara sesama masyarakat, pemerintah harus tegas dan bijaksana dalam mengambil keputusan mengenai penilaian besar ganti kerugian terhadap nilai bangunan dengan mempertimbangkan keadaan dalam lingkungan tersebut sehingga tidak ada masyarakat yang komplain atas penilaian tersebut, dan diharapkan kedepannya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat terealisasi dengan baik dan cepat.

